



Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

Paulos Hadi Tegaskan Komitmen Pemkab

Bupati Sanggau, Paulus Hadi (PH) menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar atas laporan keuangan Pemkab Sanggau tahun anggaran 2018.

Saat ini Pemkab Sanggau kata PH meraih WDP (Wajar Dengan Pergecualian) dari BPK RI atas laporan APBD Sanggau tahun 2018. Dengan begitu lanjutnya, ada beberapa catatan yang sudah ditindaklanjuti juga oleh BPK untuk pendampingan kepada Pemkab Sanggau.

"Itulahnya itu, *review*, mengevaluasi sejauh mana progress (tindak lanjut rekomendasi). Ini nanti, tanggal 11 Juni ada undangan untuk penyampaian progress masing-masing daerah," katanya ditemu wartawan usai Paripurna di Gedung DPRD Sanggau, Selasa (9/7).

Bupati Sanggau dua

jakan, sudah jelas. Sanggau ini kan yang agak berat itu soal asset, ada pemahaman soal akuntansi secara mancam, yang harus kita dorong. Ini berkaitan dengan SDM, kalau yang lain-lain kita sudah jalan, *clear*," imbuhnya.

Untuk Pemkab Sanggau kembali mempertahankan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalbar atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK itu diserahkan di Pontianak pada 28 Mei 2019 lalu.

Raihan WTP ini diparasi Wakil Ketua DPRD Sanggau, Usman. Ia mengatakan, opini WTP yang diperoleh ini merupakan kerja keras semua OPD di lingkungan Pemkab Sanggau. Sebab BPK RI Perwakilan Kalbar mengalamatkan opini WTP kepada masing-masing entitas yang ada di Kalimantan Barat secara khusus Kabupaten Sanggau tidak sembarang.

Menurut Usman, ada

syarat dan kriterianya. Antara lain penajaran laporan keuangan harus Sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan berbasis akrual, informasi yang ada dalam nota laporan keuangan harus cukup memadai sehingga pembaca laporan dapat memahami isinya.

Kemudian, lanjut dia, sistem pengendalian *internal* harus memadai dengan sistem yang bagus sehingga penyimpangan dapat dicegah. Selain itu, kepatuhan terhadap perundang-undang

(Jul/nak)

"Artinya APBD Kabupaten Sanggau sudah mengikuti ketentuan tersebut," ujar Usman.

Namun begitu, ia mengatakan, pemberian opini WTP kepada setiap entitas bukan berarti menjamin tidak ada fraud (kecurangan) ataupun penyimpangan. Namun catatan-catatan yang diberikan oleh BPK merupakan indikator dan harus ditindaklanjuti oleh Bupati.



WDP - Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot saat menerima anugerah WDP dari BPK RI Perwakilan Kalbar atas laporan APBD Sanggau tahun 2018 belum lama ini.